



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan pada mahluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan.

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.¹

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadih untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.²

Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³ Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong- menolong.⁴

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Para Nabi dan Rasul itulah orang- orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002), hlm. 387.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 55

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga diciptakan saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan lafadz pernikahan atau perkawinan. Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.⁵

Hidup berpasangan di kalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun pernikahan mempunyai arah, tugas dan tujuan, maka hendaknya dalam

⁵ Taufiq, Justisia, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, (Edisi 25, Semarang 2004), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya dipenuhi dan terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga baik kelangsungannya maupun kelestariannya dan kewajiban untuk menentramkannya sebagai satu lembaga yang penuh arti dalam hidup sejati.⁶

Pada dasarnya memilih pasangan hidup merupakan hak bagi semua orang baik laki-laki dan perempuan. Semua boleh memilih pasangan sesuai dengan kecocokan hatinya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Dalam hukum perkawinan Islam seorang wanita apabila ia hendak menikah maka restu wali merupakan hal yang sangat diutamakan. Izin wali merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan, karena pernikahan tanpa wali dianggap batal (tidak sah) sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Menurut al-Syafi'i wali merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan wanita yang berada dalam pengampuannya. Wali nikah menurut Imam Syafi'i memiliki dua hak yakni *Hak Ijb riyah* dan *Hak Ikhtiyariyah*.⁷ *Hak ijb riyah* adalah hak paksa seorang wali terhadap wanita yang berada dalam pewaliannya. Wali yang memiliki hak *ijb riyah* adalah ayah atau kakek ketika tidak ada ayah. Seorang wali yang mempunyai hak *ijb r* disebut sebagai wali mujbir yakni wali berhak memaksa untuk menikahkan anak gadisnya baik yang belum dewasa maupun yang sudah

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 26

⁷ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Qutaybah. 2003), Jilid X, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa meskipun tanpa dimintai persetujuannya, adapun meminta persetujuannya merupakan hal yang disunnahkan. Seorang anak gadis apabila ia dimintai persetujuannya yaitu cukup dengan diamnya menurut *qaul* yang shahih apabila sudah baligh dan berakal, sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah saw:

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبَكَرُ يَزُوجُهَا أَبُوهَا

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya sendirinya (dibandingkan dengan walinya), dan gadis dinikahkan oleh ayahnya (walinya).”

Adapun hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali dalam menikahkan wanita janda. Seorang janda harus dimintai persetujuannya dengan jelas tidak cukup dengan diamnya.⁸ Al-Sy fi“i menjelaskan bahwa wali bagi anak perempuan yang berstatus janda kemudian menikahkannya dengan tanpa izinnya maka pernikahannya dihukumi batal kecuali bagi ayah yang memiliki hak *ijb r* kepada anak gadisnya.⁹

Dalam kitab *al-Muhadzdzab* dijelaskan bahwa seorang ayah dan kakek dapat menikahkan anaknya yang masih gadis baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa meskipun tanpa dimintai izinnya sebagaimana yang diuraikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Dari hadits Ibnu Abbas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seorang wali mempunyai hak *ijb r* terhadap anak gadisnya adapun meminta izin itu hanya bersifat dianjurkan saja.¹⁰ Sejalan dengan penjelasan dalam kitab *al-Muhadzdzab*, al-Rafi i memberikan komentar bahwa diperbolehkan kepada bapak atau kakek untuk menikahkan anak

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 58

¹⁰ Abî Ish q Ibr him bin Ali bin Y suf Fairuz Abady Al-Syairazy, *Al-Muhadzab fi Fiqh al- Imam Al-Sy fi i*, (Beirut: D r al-Qalam. 1996), Juz IV, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadisnya baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa walaupun dengan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Adapun meminta izin adalah disunnahkan.

Namun apabila tidak meminta izin kemudian memaksanya untuk menikah maka pernikahannya dihukumi sah secara syar i.¹¹

Sedangkan menurut Abû Hanîfah dan madzhab Hanafiyyah berpandangan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *ijb r* yang dikenal dalam pandangan Abû Hanîfah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali.¹² Apabila anak gadis yang telah baligh tersebut menolak dinikahkan maka akad pernikahan pun tidak diperbolehkan.¹³

Pada dasarnya hak-hak perkawinan (*marital right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas

¹¹ Abî Q sim Abd al-Karîm bin Muḥammad bin Abd al-Karîm al-Rafî'i, *Al- Azîz Syarḥ al- Wajîz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya), 1997), Juz VII, hlm. 536.

¹² Abî Muḥammad Maḥm d bin Muḥammad al- Aini, *Al-Bin ya fi Syarḥ al-Hid ya*, (Beirut: D r al-Fikr. 1990), cet. Ke-2, Juz IV, hlm. 584

¹³ Syamsuddin al-Syarkhasi, *Al-Mabs th*, (Beirut: D r al-Ma rifah. t.t), Juz V, hlm. 2. Nama akhir dari pengarang kitab *Al-Mabs th* ini ada dua versi. Versi pertama adalah *Syamsuddin al- Syarakhsi* dan versi kedua adalah *Syamsuddin al-Syarkhasi*. Adanya perbedaan nama belakang ini sebenarnya disebabkan bahasa yang digunakan. Jika memakai *Syarakhsi* maka nama tersebut menggunakan bahasa persia. Namun, jika menggunakan kata *Syarkhasi*, maka dinisbatkan menggunakan bahasa Arab. Abu Bakar Ahmad bin Abi Sahal al-Syarakhsy, *Ushul al-Syarakhsy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz I, cet. ke-1, hlm. 4-5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Dengan demikian akan terlihat jelas bahwa al-Qur'an memperlakukan manusia secara sama dalam hal tanggung jawab moral. Hal ini secara logis meluas ke dalam lingkup perkawinan juga. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kannya sebagaimana juga seorang laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.¹⁴

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat, sehingga akhirnya penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi permasalahan di atas dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul **“Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah”**.

B. Defenisi Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Wali mujbir

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.¹⁵

2. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁶ Atau

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Huq q al Nisa' fi al-Isl m*, (Hak-Hak Wanita dalam Islam), Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 34

¹⁵ Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah), hlm. 249

¹⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengertian lain Al-Nikah bermakna *Al-Wathi dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul* Atau juga di artikan penggabungan dan percampuran.¹⁷ Beranjak dari makna etimologis di atas maka nikah secara terminologi (istilah) adalah Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁸ Selain itu Nikah juga dapat diartikan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan nikah menurut para ulama terdapat beberapa pendapat di antaranya:

Pertama, Menurut Wahbah Al-Zuhaili nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta'* dengan seorang wanita atau melakukan *wathi* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.¹⁹

Kedua, Abu Yahya Zakariya Al Anshary mendefinisikan; *Nikah* menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

Ketiga, Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah, mengatakan; Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang- senang dengan sengaja.

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhkeluarga*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar), hlm. 29

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 29

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 38

²⁰ Abdul Rohman Ghazaly, *op.cit.*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. *Kelima*, Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Keenam, Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²¹

Dari pengertian di atas Pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena Pernikahan merupakan pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.²²

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat penulis Identifikasi permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Wali menikah anaknya tanpa persetujuan anak
- b. Menikahkan dengan paksa

²¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas Semarang, 1993), hlm. 2

²² Djamaan Nur, *op.cit.* hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wali menikahkan anaknya belum dewasa

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dapat penulis membuat batasan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
- b. Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Bagaimana Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?
- b. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah
- a. Untuk mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu

Hanifah?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu pernikahan dengan wali Hakim dalam menikahkan
- b. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang akan diteliti dari tesis ini, dapat ditunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga originalitasnya dapat dijamin. Penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan UU Perkawinan yaitu :

Pertama, tesis Azlan, Pernikahan dini menurut Islam Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian ini antara lain: bahwa ulama berbeda pendapat terkait *balig* dalam usia perkawinan, antara lain: Mazhab Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Mazhab Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur

perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menilik dari kepentingan hak anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksimal.

Kedua, Tesis dari Abdullah Wasian, pada Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, Defenisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Menjelaskan gambaran umum tentang pernikahan dan wali, bab ini merupakan landasan teori. Sesuai dengan judul tesis ini maka pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian dan teori pengertian dan dasar hukum Pernikahan, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan serta macam-macam wali, Biografi Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah, Penelitian yang relevan.

BAB III Menguraikan gambaran umum tentang Metode penelitian, yang merupakan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Merupakan hasil penelitian dan analisis tentang Pendapat Imam Safi'i dan Imam Abu Hannifah Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan, Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah

BAB V Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran